

ABSTRAK

Permasalahan minimnya angka keterwakilan perempuan dalam setiap gelaran Pemilu selalu terjadi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Di Kota Jambi dinamika angka keterwakilan tersebut juga terjadi pada tahun 2019. Dari 45 kursi di DPRD Kota Jambi pada tahun 2019 yang diperebutkan oleh 628 caleg yang di dalamnya terdapat 234 orang caleg perempuan dari 16 Partai Politik, terdapat sebanyak 8 orang anggota perempuan Terpilih 17,78% yang berhasil lolos dari jumlah keseluruhan anggota dewan, sisanya sebanyak 37 orang berjenis kelamin laki-laki 82,22%. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di dalam DPRD Kota Jambi mengalami peningkatan sebanyak 2.23% dari tahun sebelumnya meskipun tidak begitu signifikan. Walaupun keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif Kota Jambi meningkat, namun masih belum juga menunjukkan terpenuhinya kuota 30% perwakilan perempuan di dalam parlemen itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Jambi belum mencapai kuota 30%. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rendahnya tingkat keTerpilihhan perempuan pada pemilu tahun 2019 di Kota Jambi, yang mana di dalamnya terdapat hambatan-hambatan signifikan baik pada sisi penawaran (*supply*) maupun pada sisi permintaan (*demand*) dari partai politik. Pada sisi *supply* diketahui bahwa caleg perempuan yang bertarung di Pemilu Kota Jambi tahun 2019 memiliki keterbatasan dan hambatan di berbagai hal. Pertama, keterbatasan ruang gerak dan waktu. Kedua, sumber daya finansial yang minim. Ketiga, pengalaman politik yang sedikit. Ketiga jaringan sosial yang terbatas, dan Kelima rendahnya motivasi politisi perempuan dalam berkarir politik. Pada Sisi *demand* ini menjelaskan penyebab rendahnya tingkat keTerpilihhan perempuan di Kota Jambi meski kuota 30% telah dipenuhi oleh partai politik. Efek dari diskriminasi gender di partai politik baik *direct* maupun *imputed* bukan terlihat langsung pada jumlah perempuan pada daftar calon. Karena jumlah tersebut telah diatur dalam undang-undang. Efek diskriminasi itu terlihat justru dalam proses pemenangan khususnya pada akses terhadap mesin partai politik pengusung caleg tersebut.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Hambatan, Pelaksanaan, Pemilu Legislatif 2019

ABSTRACT

The problem of the minimum number of women's representation in every election event always occurs both at the central and regional levels. In Jambi City, the dynamics of the representation rate also occurred in 2019. Of the 45 seats in the Jambi City DPRD in 2019 which were contested by 628 candidates, in which there were 234 female candidates from 16 Political Parties, there were 8 female members who were elected 17.78% who managed to pass from the total number of members of the council, the remaining 37 people were male 82.22%. This number shows that the representation of women in the Jambi City DPRD has increased by 2.23% from the previous year, although not so significant. Even though women's involvement in the Jambi City legislative election has increased, it still has not shown that the 30% quota for women's representation in the parliament itself has been fulfilled. This research aims to find out and understand the reasons why women's representation in the 2019 legislative elections in Jambi City has not reached the 30% quota. This research method uses qualitative methods with data collection techniques of interviews and documentation studies. The results of this study show that exposure uses the supply-demand theory which illustrates the low rate of women's electability in the 2019 elections in Jambi City, in which there are significant obstacles both on the supply side and on the demand side from political parties. First, limited space and time, Second, minimal financial resources, Third, little political experience, Third, limited social networks, and Fifth, the low motivation of female politicians in a political career. On the demand side, this explains the reason for the low electability of women in Jambi City, even though the 30% quota has been met by political parties. The effects of gender discrimination in political parties, both direct and imputed, are not directly reflected in the number of women on the candidate list. Because this amount has been regulated in law. The effect of discrimination can be seen precisely in the process of winning, especially in access to machines

Keywords: Women's Representation, Obstacles, Implementation, 2019 Legislative Elections